

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seperti yang telah diuraikan dari pembahasan hasil penelitian yang sudah dijelaskan, dapat dikatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Perkebunan Ajamu Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu belum berjalan dengan baik. Penjelasan sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan N0.01 dalam pertanggungjawaban keuangan desa

Karena Pemerintah Desa Perkebunan Ajamu hanya menggunakan Laporan Realisasi Anggaran dalam laporan pertanggungjawabannya, meskipun menggunakan basis akrual, hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Perkebunan Ajamu belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No.01.

2. Hambatan yang terjadi dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa Perkebunan Ajamu yang sesuai dengan PSAP 01

Desa Perkebunan Ajamu mengalami keterbatasan sebagai berikut:

- a. Dapat dikatakan bahwa secara kualitas masih diperlukan peningkatan sebab apa yang dipahami pegawai terkait akuntansi pemerintahan masih rendah.
- b. Kurang nya pengalaman pegawai dalam pengerjaan laporan keuangan.
- c. Kurangnya bimbingan atau pelatihan terkait penerapan standar akuntansi pemerintahan.

B. Saran

Berdasar kesimpulannya, agar dicapai Penerepan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tepat serta lebih meksimal ditahun-tahun mendatang, maka hendaknya bisa dibenahi dari sejumlah hal, untuk itu saran yang diajukan disini yakni:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, yang memperluas pengetahuan tentang cara penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada dengan melengkapi komponen-komponen laporan keuangan, Pemerintah Desa Perkebunan Ajamu harus dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 dalam pertanggungjawaban keuangan desa dalam waktu dekat.
2. Dilihat dari keterbatasan penelitian ini adalah peneliti hanya melakukan penilaian terhadap pegawai hanya memakai persepsi tidak dilakukan penilaian langsung dari hasil pelaksanaan yang dilakukan penelitian ini juga belum sepenuhnya dikembangkan terkait pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan. Penulis memberikan saran agar peneliti selanjutnya dapat melakukan penilaian pegawai terhadap pengerjaan laporan keuangan dari evaluasi pelaksanaan secara riil tentang pelaksanaan standar akuntansi pemerintahannya, dan melakukan pengembangan terhadap pelaksanaan wawancara terhadap kesiapan pegawai dalam pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan